

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,  
TINGKAT INFLASI, DAN PDRB TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN DAN  
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
(TAHUN 2011-2014)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**STEVANUS IRVAN PRASETYO**  
**NIM. 12020111120010**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2016**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Stevanus Irvan Prasetyo

Nomor Induk Mahasiswa : 12020111120010

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,  
TINGKAT INFLASI, DAN PDRB TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN  
DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
(TAHUN 2011-2014)**

Dosen Pembimbing : Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.

Semarang, 7 April 2016

Dosen Pembimbing

(Dra.Herniwati Retno Handayani, MS.)

NIP. 19551128 198103 2004

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Stevanus Irvan Prasetyo  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111120010  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan)  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,  
TINGKAT INFLASI, DAN PDRB TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN  
DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
(TAHUN 2011-2014)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 Mei 2016**

Tim Penguji

1. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS (.....)
2. Akhmad Syakir Kurnia, SE., M.Si., Ph.D. (.....)
3. Nenek Woyanti, SE., M.Si. (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Stevanus Irvan Prasetyo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2011-2014)”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi inididak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, danau tau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 April 2016

Yang membuat pernyataan,

(Stevanus Irvan Prasetyo)

NIM: 12020111120010

## **ABSTRAK**

Sejak masa desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2000 setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber penerimaan untuk membangun daerahnya sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian daerah, daerah dapat mengupayakan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pendapatan yang paling besar dan potensial dari PAD adalah sektor penerimaan pajak daerah. Walaupun secara nominal penerimaan pajak daerah selalu meningkat namun kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD masih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2011-2014.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda yang diestimasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS-Ordinary Least Square). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. data yang digunakan adalah data pooling, yaitu gabungan antara data runtut waktu (time series) selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2011-2014 dan data silang tempat (cross section) yaitu 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga menghasilkan 140 obyek penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan variabel PDRB harga konstan dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Kata kunci : Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, PDRB

## **ABSTRACT**

*Since the period of fiscal decentralization and regional autonomy, which began in 2000 each region is required to be able to dig a source of revenue to build its own region. Therefore, to increase the independence of the region, the region may seek an increase the Local Revenue (PAD). The greatest and the potential of the income from PAD is a sector of regional tax revenue. Although nominally regional tax revenue is increasing but the contribution of regional tax revenues to PAD is still small. This study are purposely to identify the effect of total population, inflation of rate, and the PDRB to regional tax revenue kabupaten and cities in Central Java province during the period 2011-2014*

*The analysis method applied in this research with multiple regression analysis. were estimated by the method of ordinary least squares (OLS-Ordinary Least Square). The data of which this research is secondary data obtained from the Center Statistics Organization (BPS) Central Java Province. The data of which use the pooling technique, which is a combination of time series data (time series) for 4 (four) years is 2011-2014 and data cross section data (cross section) from 35 kabupaten / cities in Central Java province, so have 140 research objects the pooling technique are used to examine the samples that have been collected.*

*The analysis showed that a variable total of the population have a positive effect but not significant to the regional tax revenues, and the other independent variables, which are PDRB constant prices and the inflation rate have a significant and positive effect on the regional tax revenues of the kabupaten / cities in Central Java province.*

*Key words : Regional Tax Revenues, Total Population, Inflation Rate, PDRB*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan YME karena atas rahmat dan karunia-Nya serta Tuhan Yesus penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2011-2014)” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program sarjana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan doa, dukungan, bimbingan, masukan dan semangat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Allah atas rahmat dan karunia-Nya beserta Tuhan Yesus yang memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

4. Ibu Dra. Herniwati Retno Handayani, MS selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingannya, masukan, kritikan, motivasi, dan kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, MSc., Ph.D selaku dosen wali atas segala arahan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta berbagi pengalaman selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
7. Karyawan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu pencarian dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta Agustinus Soebijakto dan Ibunda tercinta Fransisca Anung Wirandani yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus. Papa mama akan selalu menjadi panutan bagi penulis.
9. Adikku tersayang Nikolaus Sandy Darmawan dan Claudia Intan Permatasari yang telah memberikan semangat, doa, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Silvestra Prima Puput Ardhana, S.Pd terima kasih atas kasih sayang, semangat, kepercayaan, dukungan, dan doanya selama ini.
11. Teman-teman IESP angkatan 2011 yang sangat saya banggakan dan cintai, terima kasih atas perjuangan kalian yang selalu menemani penulis,

terima kasih atas kebersamaan yang sudah diberikan, dukungan moral, perhatian, canda tawa, dan membagi kesedihan yang telah kalian berikan selama ini.

12. Teman-teman Wacana Lovers: Billy, Putra, Krisna, Rindu, Iis, Maulana, Akbar, Wuri, Ucha, Anindya, Yoga, Faishol, Mizan, Puguh.
13. Teman-teman Tim KKN II Desa Panjang, Kcamatan Bae, Kabupaten Kudus: Bunga, Rozy, Hanif, Leo, Hilman, Kurnia, Fina, Izas, Wisnu.
14. Teman-teman kos Ijo yang sudah mengisi hari-hari penulis selama di Semarang: Joinsyah, Mas Chandra, Mas Deni, Mas Mulyono, Mas Aris, Mas Regi.
15. Teman-teman kos Oemah Kita yang sudah mengisi hari-hari penulis selama di Semarang: Mas Mulyono, Mas Agung, Mas Deni, Mas Ade, Ghofur, Nayoko, Ikbal, Naufal.

Semarang, 7 April 2016

(Stevanus Irvan Prasetyo)

NIM: 12020111120010

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	22
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	23
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	23
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	23
1.4 Sistematika Penulisan .....	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	26
2.1 Landasan Teori .....	26
2.1.1 Sumber Penerimaan Negara .....	26
2.1.2 Fungsi Pajak .....	28
2.1.3 Jenis Pajak .....	29
2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak .....	31
2.2 Sumber Penerimaan Daerah .....	33
2.3 Pajak .....	34
2.4 Pendapatan Asli Daerah .....	36
2.5 Pajak Daerah .....	37

2.6 Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan PDRB terhadap Pajak Daerah.....	39
2.6.1 Jumlah Penduduk .....	39
2.6.2 Tingkat Inflasi .....	41
3.4.1 PDRB .....	42
2.7 Penelitian Terdahulu .....	43
2.8 Kerangka Pemikiran .....	50
2.9 Hipotesis .....	51
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definifisi Operasional.....	52
3.1.1 Variabel Dependen.....	52
3.1.2 Variabel Independen .....	52
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	53
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	54
3.4 Metode Analisis Data .....	55
3.4.1 Analisis Regresi .....	55
3.4.2 Estimasi Regresi dengan Pendekatan FEM.....	58
3.4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik .....	62
3.4.3.1 Deteksi Normalitas .....	62
3.4.3.2 Deteksi Multikolinieritas .....	62
3.4.3.3 Deteksi Autokorelasi .....	63
3.4.3.4 Deteksi Heteroskedastisitas .....	64
3.4.3.5 Metode Newey West.....	66
3.4.4 Pengujian Hipotesis.....	67
3.4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	67
3.4.4.2 Uji F (Simultan).....	68
3.4.4.3 Uji t (Individu).....	69

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	71
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	71
4.1.1 Keadaan Umum Provinsi Jawa Tengah .....	71
4.1.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	72
4.1.3 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	75
4.1.4 Tingkat Inflasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	77
4.1.5 PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	78
4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik .....	80
4.2.1 Deteksi Uji Normalitas.....	80
4.2.2 Deteksi Uji Multikolinieritas.....	81
4.2.3 Deteksi Uji Autokorelasi.....	82
4.2.4 Deteksi Uji Heteroskedastisitas.....	83
4.2.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	85
4.2.6 Uji F (Simultan) .....	86
4.2.7 Uji t (Individu) .....	87
4.3 Interpretasi Hasil .....	87
4.3.1 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	87
4.3.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Penerimaan Pajak Daerah.....	90
4.3.3 Hubungan Tingkat Inflasi dengan Penerimaan Pajak Daerah.....	91
4.3.4 Hubungan PDRB dengan Penerimaan Pajak Daerah.....	93

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	98
LAMPIRAN.....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (dalam ribu rupiah) .....	7
Tabel 1.2	Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (dalam ribu rupiah) .....	8
Tabel 1.3	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah (dalam ribu rupiah).....	9
Tabel 1.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 (dalam juta rupiah)...	12
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (jiwa).....	15
Tabel 1.6	Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (persen) .....	17
Tabel 2.1	Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (jiwa).....	73
Tabel 4.2	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (dalam ribu rupiah) .....	75
Tabel 4.3	Hasil Normalitas dengan Uji Jarque-Bera (J-B test).....	81
Tabel 4.4	Tabel Residual Correlation Matrix.....	82
Tabel 4.5	Hasil Nilai Durbin Watson.....	83
Tabel 4.6	Hasil Uji White.....	84
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi R-squared.....	85
Tabel 4.8	Hasil Uji F Statistik (Simultan).....	86
Tabel 4.9	Hasil Regresi Data Panel.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (persen).....	77
Gambar 4.2	PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (dalam juta rupiah) .....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A .....	102
LAMPIRAN B .....	107
LAMPIRAN C .....	109
LAMPIRAN D .....	111

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan adalah serangkaian usaha yang saling terkait yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat di suatu bangsa dengan negara untuk melakukan seluruh tugas mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Negara Indonesia yang mencakup 34 provinsi, 508 kota/kabupaten, dan 542 daerah otonom (Ditjen Otda Depdagri, 2014). Pembangunan secara nasional bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dari setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Pembangunan di daerah perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami peningkatan dan mampu bersaing dengan daerah lain. Pembangunan di daerah perlu diarahkan kepada sektor-sektor produktif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi skala nasional.

Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah tersebut maka pembangunan daerah diarahkan untuk pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerintah pusat membuat kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsi di daerahnya masing-masing termasuk di dalamnya tugas untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal. Hal ini dilakukan dengan tujuan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang sulit untuk dipisahkan dari keberhasilan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini dengan pemberian otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai kebijakan-kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hadirnya otonomi daerah mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dikoordinir oleh pemerintah pusat sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom seperti Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali potensi-potensi keuangan daerahnya sendiri. Hal ini juga seharusnya meminimalkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat. Konsekuensi dari penetapan otonomi daerah adalah daerah harus berupaya meningkatkan kas daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kebijakannya sendiri. Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara mencari dan menggali potensi-potensi pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang semakin terbatas. Semakin tinggi peranan PAD dan semakin kecil ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat merupakan hasil dari keberhasilan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah

pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Penerimaan Daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Bab IV Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 adalah:

1. PAD bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Pendapatan bunga;
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan yang lain seperti Dana Perimbangan yang sumbernya dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Lain-lain Pendapatan. Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus membuat kebijakan pengaturan untuk menjamin keberhasilan penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak eksklusif pemerintah, pungutan tersebut dilandaskan oleh undang-undang. Pemungutan pajak dapat dipaksakan kepada subjek pajak yang dimana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya (Guritno Mangunkusubroto, 2001). Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, namun daerah kabupaten/kota diberikan kebebasan untuk menggali potensi-potensi dalam sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pajak daerah juga dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang publik. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak sangat penting untuk menyokong pembangunan suatu daerah. Apabila pajak suatu daerah tidak maksimal maka pembangunan di daerah tersebut juga tidak akan maksimal. Begitupun sebaliknya apabila pajak suatu daerah tersebut maksimal maka pembangunan di daerah tersebut akan maksimal.

Provinsi Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/kota sebagai daerah-daerah otonom harus mampu membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan yang terdapat di daerah tanpa tergantung dari pemerintah pusat. Daerah-daerah tersebut dapat memaksimalkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah mereka sendiri, antara lain Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004.

Untuk mengetahui kondisi secara umum PAD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada realisasi PAD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah**  
**35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah**  
**(dalam ribu rupiah)**

Tahun	Pendapatan	PAD	Kontribusi
2011	5.710.938.714	2.935.915.113	51,41%
2012	6.795.340.459	3.715.492.586	54,68%
2013	8.304.893.725	4.973.658.953	59,89%
2014	10.575.845.939	6.076.736.579	57,46%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2011-2014 (diolah)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat, kontribusi PAD pada empat tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dalam penerimaan daerah pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang selalu fluktuatif secara kontribusi, angka tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2013 dengan kontribusi mencapai 59,89% dan angka terendah di tahun anggaran 2011 dengan 51,41% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 55,86% pertahun.

Dari PAD tersebut, dapat dilihat kontribusi sektor pajak daerah dalam struktur PAD seperti yang terdapat pada Tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD**  
**35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah**  
**(dalam ribu rupiah)**

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi
2011	2.935.915.113	1.102.600.223	37,55%
2012	3.715.492.586	1.480.665.973	39,85%
2013	4.973.658.953	1.858.763.587	37,37%
2014	6.076.736.579	2.325.111.954	38,26%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2011-2014 (diolah)

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat, kontribusi Pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah pada empat tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang fluktuatif, angka tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2012 dengan kontribusi mencapai 39,85% dengan angka terendah dicapai pada tahun anggaran 2013 dengan kontribusi hanya mencapai 37,37% dan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 38,25% pertahun. Dalam tabel 1.3 dapat dilihat besaran Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.3**  
**Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota**  
**Se Provinsi Jawa Tengah**  
**(dalam ribu rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				r/tahun
		2011	2012	2013	2014	
1	Kab. Cilacap	59.511.382	75.235.400	90.013.245	120.349.765	27,78%
2	Kab. Banyumas	20.891.263	29.555.418	35.876.407	40.540.243	34,14%
3	Kab. Purbalingga	15.893.749	16.659.081	20.351.235	23.103.789	17,06%
4	Kab. Banjarnegara	12.376.940	16.075.497	21.276.091	24.681.478	27,96%
5	Kab. Kebumen	17.326.904	19.945.056	24.357.582	29.071.650	23,62%
6	Kab. Purworejo	9.807.700	10.376.414	15.240.087	20.347.211	26,14%
7	Kab. Wonosobo	8.822.723	11.235.408	18.980.340	22.480.190	36,42%
8	Kab. Magelang	29.333.617	30.587.413	32.973.139	37.108.230	14,04%
9	Kab. Boyolali	19.256.739	23.760.385	27.597.600	31.240.976	22,57%
10	Kab. Klaten	28.261.720	30.750.843	37.108.934	43.885.444	23,08%
11	Kab. Sukoharjo	42.558.643	46.780.139	49.140.871	52.460.883	31,86%
12	Kab. Wonogiri	10.867.383	11.497.615	17.780.218	22.148.671	24,56%
13	Kab. Karanganyar	40.731.984	54.240.980	58.100.235	60.973.874	29,48%
14	Kab. Sragen	20.594.220	22.865.673	29.984.217	31.780.376	16,19%
15	Kab. Grobogan	13.080.600	13.254.875	17.425.175	21.875.662	14,54%
16	Kab. Blora	11.177.375	16.756.432	19.463.214	23.579.145	26,45%
17	Kab. Rembang	14.568.408	20.099.341	24.875.324	28.109.867	25,75%
18	Kab. Pati	30.247.445	48.876.645	51.245.773	59.976.144	41,16%
19	Kab. Kudus	36.687.745	55.870.465	65.745.118	72.300.879	39,33%
20	Kab. Jepara	25.022.287	29.874.340	33.338.102	38.654.934	20,18%

Tabel 1.3 (Lanjutan)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				r/tahun
		2011	2012	2013	2014	
21	Kab. Demak	24.450.790	25.508.135	31.087.021	35.951.200	30,83%
22	Kab. Semarang	39.433.225	60.509.926	74.992.314	87.430.145	39,18%
23	Kab. Temanggung	11.212.598	14.076.789	20.743.345	25.908.143	37,38%
24	Kab. Kendal	25.891.043	28.673.321	32.203.197	36.799.610	12,88%
25	Kab. Batang	14.380.059	19.894.300	25.984.331	30.800.276	32,62%
26	Kab. Pekalongan	15.090.373	20.764.120	29.130.973	34.286.912	34,20%
27	Kab. Pemalang	15.848.286	20.003.442	29.760.499	34.650.135	26,34%
28	Kab. Tegal	21.861.932	35.958.475	40.435.210	46.389.136	35,75%
29	Kab. Brebes	20.958.214	27.894.354	33.254.908	40.435.917	25,86%
30	Kota. Magelang	9.463.834	12.876.109	20.736.280	28.754.163	44,16%
31	Kota. Surakarta	118.816.235	225.870.954	320.908.171	430.153.950	65,54%
32	Kota. Salatiga	15.900.468	23.872.985	28.150.431	30.333.671	37,13%
33	Kota. Semarang	261.471.100	325.847.607	413.769.300	587.411.910	35,18%
34	Kota. Pekalongan	19.911.976	25.974.230	30.763.189	32.986.700	29,34%
35	Kota. Tegal	20.891.263	28.643.806	35.971.511	38.150.675	32,05%
Jumlah/Total		1.102.600.223	1.480.665.973	1.858.763.587	2.325.111.954	33,59%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2011-2014 (diolah)

Dari Tabel 1.3, pendapatan sektor pajak daerah dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2014 dan Kota Semarang masih dengan pendapatan Pajak Daerah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Namun peningkatan pajak daerah ini tidak dengan sendirinya menunjukkan peningkatan kontribusi dalam PAD karena dapat dilihat di atas kontribusi tertinggi pajak daerah dalam PAD terdapat pada tahun 2012 yang hanya sebesar 39,85%.

Kondisi keuangan daerah seperti ini merupakan karakteristik kondisi keuangan negara sedang berkembang termasuk Indonesia salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Harold A. Aldefer (1964) dalam Alfian Lains (1985). Karakteristik tersebut antara lain karena kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap penerimaan daerah total sangat kecil dimana seharusnya kontribusi penerimaan pajak daerah dan PAD dapat menjadi sumber pemasukan daerah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan di daerah tersebut secara mandiri.

Jika dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penerimaan PAD di Provinsi Jawa Tengah cukup potensial. Hal ini disebabkan dari nilai dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan dalam nilai PDRB di Provinsi Jawa Tengah mencerminkan keberhasilan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, sehingga seharusnya dapat memicu peningkatan PAD terutama dari pajak

daerah. Untuk mengetahui PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014**  
**(dalam juta rupiah)**

Kabupaten/Kota	Tahun				r/tahun
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Cilacap	102.224.564,1	108.390.045,6	117.650.246,4	120.305.765,8	5,61%
Kab. Banyumas	11.354.318,36	12768631,81	14237625,75	16.341.765,9	12,91%
Kab. Purbalingga	6.521.622,12	7.298.610,75	8.156.951,9	8.345.670,1	8,66%
Kab. Banjarnegara	7.445.540,44	8.209.778,74	9.172.144,21	9.480.212,67	8,45%
Kab. Kebumen	7.122.249,81	7.904.612,5	8.835.316,23	9.132.047,33	8,71%
Kab. Purworejo	7.143.081,12	7.871.108,76	8.733.568	8.912.867,2	7,73%
Kab. Wonosobo	4.323.254,88	4.784.241,24	5.327.874,47	5.578.931,6	8,91%
Kab. Magelang	8.770.808,7	9.736.556,38	10.814.289,76	11.758.935,31	10,27%
Kab. Boyolali	9.028.333,47	9.976.878,4	11.168.765,48	11.353.027,8	8,03%
Kab. Klaten	12.186.800,75	13.532.316,69	15.217.800,78	18.039.733,4	14,01%
Kab. Sukoharjo	11.004.550,24	12.262.175,12	13.760.306,62	15.689.803	12,56%
Kab. Wonogiri	7.189.374,13	7.943.958,17	8.815.332,93	9.217.602,3	8,68%
Kab. Karanganyar	10.287.905,32	11.467.342,95	12.857.290,06	13.025.433,9	8,30%
Kab. Sragen	7.579.678,26	8.561.830,14	9.684.551,73	10.438.775,98	11,29%
Kab. Grobogan	7.141.461,62	8.045.458,09	8.934.577,58	9.475.433,6	9,92%
Kab. Blora	4.868.973,89	5.310.079,66	5.972.604,56	6.412.356,61	9,63%
Kab. Rembang	5.440.169,44	5.951.888,89	6.579.916,17	7.154.988,45	9,57%
Kab. Pati	10.456.446,85	11.534.382,85	12.882.089,54	13.576.123,6	9,13%
Kab. Kudus	33.848.973,32	36.959.414,04	41.192.663,77	42.590.760,88	8,01%
Kab. Jepara	10.119.549,88	11.217.718,06	12.517.487,08	15.319.607,61	14,94%

Lanjutan Tabel 1.4

Kabupaten/Kota	Tahun				r/tahun
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Demak	6.517.206,95	7.168.401,57	7.950.828,67	8.310.892,7	8,48%
Kab. Semarang	12.335.446,51	13.845.496,17	15.748.752,42	17.901.265,33	13,22%
Kab. Temanggung	5.603.983,71	6.198.351,81	6.915.876,33	7.399.136,1	9,72%
Kab. Kendal	12.130.057,82	13.431.609,62	14.923.436,65	18.751.034,51	15,83%
Kab. Batang	5.865.055,45	6.492.405,14	7.219.973,91	7.690.731,24	9,47%
Kab. Pekalongan	8.033.444,43	8.934.754,25	10.014.968,44	11.376.345,7	12,30%
Kab. Pemasaran	8.859.721,5	9.771.666,56	10.924.552,15	11.441.237,99	8,94%
Kab. Tegal	8.798.459,34	9.802.454,71	10.989.141,94	11.375.046,62	9,01%
Kab. Brebes	16.426.881,4	18.026.804,5	20.199.855,92	21.456.077,6	9,34%
Kota. Magelang	2.323.478,16	2.613.893,85	2.911.108,95	3.028.166,75	9,30%
Kota. Surakarta	10.992.971,19	12.180.558,66	13.599.596,52	15.491.267,75	12,12%
Kota. Salatiga	2.029.266,37	2.239.538,12	2.282.283,7	2.327.653,25	4,75%
Kota. Semarang	48.461.410,41	54.384.654,53	61.092.825,55	62.590.700,23	9,00%
Kota. Pekalongan	4.191.357,5	4.636.010,23	5.201.368,17	5.451.389,65	9,20%
Kota. Tegal	2.846.975,05	3.081.836,46	3.398.772,98	3.780.769,87	9,92%
Jumlah/Total	650.100.572,18	691.343.115,96	726.899.706,38	766.271.771,27	5,63%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2011-2014 (diolah)

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selalu meningkat secara nominal dari tahun ke tahun. Secara umum, rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 2011-2014 yang tertinggi berada di Kabupaten Kendal yang mencapai angka pertumbuhan sebesar 15,83%, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Jepara yang mencapai rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 14,94%, lalu selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Klaten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,01%. Rata-rata pertumbuhan PDRB terendah adalah Kota Salatiga yang hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,75%, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Cilacap sebesar 5,61%. Rata-rata pertumbuhan PDRB di Kota Semarang dimana

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dijadikan *benchmark* adalah 9,00%. Rata-rata pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah adalah 5,63%.

Peranan pajak daerah menjadi sangat penting dalam era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti saat ini. Pajak daerah merupakan komponen yang berpotensi dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pajak daerah dapat mendorong proses pembangunan di suatu daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, tetapi sering sekali pajak daerah hanya menyumbang sepersekian persen dari pendapatan keseluruhan dari masing-masing kabupaten/kota sehingga di beberapa kabupaten/kota masih begitu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat atau negara.

Selain PDRB yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah, namun terdapat indikator lain yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu jumlah penduduk dan tingkat inflasi. Proses pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk baik dalam jumlah besar ataupun kecil. Apabila suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang banyak maka proses pembangunan daerah tersebut dapat semakin cepat terlaksana sedangkan apabila suatu daerah tersebut memiliki jumlah penduduk yang sedikit maka pembangunan di daerah tersebut akan semakin lambat untuk dilaksanakan. Semakin cepat pembangunan di suatu daerah maka penerimaan pajak daerah akan semakin besar karena penduduk memahami penerimaan pajak

daerah akan digunakan untuk membiayai kebijakan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2011-2014 (jiwa) disajikan pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2011-2014 (jiwa)**

Kabupaten/Kota	Tahun				r/tahun
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Cilacap	1.651.940	1.679.864	1.676.089	1.685.573	0,68%
Kab. Banyumas	1.570.598	1.603.037	1.605.579	1.620.918	1,06%
Kab. Purbalingga	858.798	877.489	879.880	889.214	1,17%
Kab. Banjarnegara	875.214	890.962	889.921	895.986	0,79%
Kab. Kebumen	1.162.294	1.181.678	1.176.722	1.181.006	0,54%
Kab. Purworejo	696.141	708.483	705.483	708.038	0,57%
Kab. Wonosobo	758.993	771.447	769.318	773.280	0,63%
Kab. Magelang	1.194.353	1.219.371	1.221.681	1.233.695	1,09%
Kab. Boyolali	936.822	953.317	951.817	957.857	0,75%
Kab. Klaten	1.135.201	1.153.047	1.148.994	1.154.040	0,55%
Kab. Sukoharjo	832.094	848.718	849.506	856.937	0,99%
Kab. Wonogiri	929.870	946.373	942.377	945.817	0,57%
Kab. Karanganyar	821.694	838.762	840.171	848.255	1,07%
Kab. Sragen	861.939	875.283	871.989	875.600	0,53%
Kab. Grobogan	1.316.693	1.339.127	1.336.304	1.343.960	0,69%
Kab. Blora	833.786	847.125	844.444	848.369	0,58%
Kab. Rembang	596.801	608.548	608.903	614.087	0,96%
Kab. Pati	1.198.935	1.219.993	1.218.016	1.225.594	0,74%
Kab. Kudus	788.264	807.005	810.810	821.136	1,37%
Kab. Jepara	1.115.688	1.144.916	1.153.213	1.170.797	1,62%

Lanjutan Tabel 1.5

Kabupaten/Kota	Tahun				r/tahun
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Demak	1.067.993	1.091.379	1.094.472	1.106.328	1,19%
Kab. Semarang	944.877	968.383	974.092	987.557	1,49%
Kab. Temanggung	715.907	730.720	731.911	738.915	1,06%
Kab. Kendal	908.533	926.325	926.812	934.643	0,95%
Kab. Batang	713.942	728.578	729.616	736.397	1,04%
Kab. Pekalongan	845.471	861.366	861.082	867.573	0,87%
Kab. Pemasang	1.264.535	1.285.024	1.279.596	1.284.236	0,52%
Kab. Tegal	1.399.789	1.421.001	1.415.009	1.420.132	0,49%
Kab. Brebes	1.742.528	1.770.480	1.764.648	1.773.379	0,59%
Kota. Magelang	118.606	120.447	119.935	120.373	0,50%
Kota. Surakarta	501.650	509.576	507.825	510.077	0,56%
Kota. Salatiga	173.056	177.480	178.594	181.193	1,55%
Kota. Semarang	1.585.417	1.629.924	1.644.800	1.672.999	1,81%
Kota. Pekalongan	284.413	290.347	290.870	293.704	1,08%
Kota. Tegal	240.777	244.632	243.860	244.998	0,58%
Jumlah/Total	32.643.612	33.270.207	33.264.339	33.522.663	0,89%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2011-2014 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.5, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 mencapai 32.643.612 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 33.522.663 pada tahun 2014 dan rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah adalah 0,89%.

Selain PDRB dan jumlah penduduk yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah, terdapat indikator lain yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu tingkat inflasi. Apabila suatu daerah memiliki tingkat inflasi yang cenderung stabil maka pembangunan di

daerah tersebut dapat berjalan tanpa hambatan sedangkan apabila suatu daerah memiliki tingkat inflasi yang cenderung berfluktuasi maka pembangunan di daerah tersebut akan memiliki hambatan.

Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2011-2014 (persen) disajikan pada Tabel 1.6.

**Tabel 1.6**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2011-2014 (persen)**

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata/tahun
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Cilacap	5,15	6,86	8,13	7,91	7,01%
Kab. Banyumas	3,36	4,64	8,26	6,90	5,79%
Kab. Purbalingga	4,40	4,02	9,22	8,77	6,60%
Kab. Banjarnegara	4,63	4,45	8,09	7,55	6,18%
Kab. Kebumen	4,42	4,14	10,06	7,13	6,44%
Kab. Purworejo	2,47	3,60	6,98	8,86	5,48%
Kab. Wonosobo	2,64	3,80	8,54	8,16	5,79%
Kab. Magelang	2,64	2,57	8,09	7,67	5,24%
Kab. Boyolali	3,31	3,38	8,01	7,85	5,64%
Kab. Klaten	1,68	3,61	7,75	7,53	5,14%
Kab. Sukoharjo	2,60	4,16	8,17	7,67	5,65%
Kab. Wonogiri	2,96	3,40	8,33	7,02	5,43%
Kab. Karanganyar	3,25	3,28	8,44	7,17	5,53%
Kab. Sragen	2,82	3,68	7,34	8,21	5,51%
Kab. Grobogan	1,86	4,40	7,65	7,77	5,42%
Kab. Blora	2,22	3,84	7,73	6,92	5,18%
Kab. Rembang	2,70	4,21	6,70	7,37	5,25%
Kab. Pati	2,28	3,85	7,38	7,75	5,32%
Kab. Kudus	3,28	4,68	8,04	8,29	6,07%
Kab. Jepara	3,56	4,43	7,74	9,50	6,31%

Lanjutan Tabel 1.6

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata/tahun
	2011	2012	2013	2014	
Kab. Demak	3,42	4,03	7,94	8,42	5,95%
Kab. Semarang	3,24	4,48	7,96	8,33	6,00%
Kab. Temanggung	2,40	4,64	7,13	7,56	5,43%
Kab. Kendal	3,48	3,89	8,04	8,06	5,87%
Kab. Batang	2,96	3,78	10,77	7,42	6,23%
Kab. Pekalongan	2,63	2,88	7,99	8,32	5,45%
Kab. Pemasang	3,36	4,04	6,36	7,15	5,23%
Kab. Tegal	2,50	4,06	7,57	8,16	5,57%
Kab. Brebes	3,04	4,51	9,49	6,04	5,77%
Kota. Magelang	4,07	5,65	7,59	7,66	6,24%
Kota. Surakarta	1,91	2,84	8,12	7,75	5,16%
Kota. Salatiga	2,82	4,04	7,46	7,59	5,48%
Kota. Semarang	2,83	4,76	7,99	8,21	5,95%
Kota. Pekalongan	2,44	3,52	7,21	7,57	5,18%
Kota. Tegal	2,54	3,07	5,67	7,18	4,62%
Jumlah/Total	3,03	4,04	7,94	7,75	5,69%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2011-2014 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.6, tingkat inflasi di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dan tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Batang pada Tahun 2013 dengan tingkat inflasi sebesar 10,77% sedangkan tingkat inflasi terendah adalah di Kabupaten Klaten sebesar 1,68%. Rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah adalah 5,69%.

Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian dari Sutrisno (2002), dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Kabupaten Semarang)” menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak daerah adalah jumlah penduduk, jumlah pelanggan listrik, pendapatan perkapita, jumlah petugas pajak, dan jumlah wisatawan. Menurutnya peningkatan jumlah pelanggan listrik memberikan efek yang besar terhadap penerimaan pajak daerah. Menurutnya pula, peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran maupun terhadap penerimaan pajak daerah. Di samping itu peningkatan jumlah wisatawan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran serta memberikan efek peningkatan pajak daerah yang relatif besar.

Veronika Winarti Agustiningtyas (2003), dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 1998-2001)” menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 1998-2001 adalah pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, anggaran pembangunan pemerintah daerah/investasi pemerintah daerah, daya listrik tersambung sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh secara signifikan.

Muhammad Masrofi (2004), dalam tesisnya yang berjudul “Potensi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang)” berpendapat bahwa hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah sedangkan variabel inflasi dan perubahan peraturan menunjukkan tidak signifikan terhadap pajak dan retribusi daerah.

Della Putri Rahdina (2008), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah” menunjukkan bahwa tingkat inflasi, jumlah rumah tangga berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Depok sedangkan jumlah pemasangan reklame berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Depok.

Kristiana Advina Helti (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah serta Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)” menunjukkan bahwa di antara variabel inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB maka yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel jumlah penduduk.

Alfian Nurrohman (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)” menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan variabel inflasi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan secara bersama-sama variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Surakarta Tahun 1994-2007.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada masa desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2000 setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber penerimaan untuk membangun daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai derajat kemandirian suatu daerah. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri.

Berdasarkan Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 dalam latar belakang, diketahui bahwa penerimaan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah hampir selalu meningkat setiap tahunnya secara nominal namun sangat disayangkan kontribusi pajak daerah terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang cukup potensial. Beberapa hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD, seperti: inflasi, PDRB, dan jumlah penduduk. (Sutrisno,2002; Veronika Winarti Agustiningtyas, 2003; Muhammad Masrofi, 2004; Della Putri Rahdina, 2008; Kristiana Advina Helti, 2010; Alfian Nurrohman, 2010).

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dicoba untuk dirumuskan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014?
2. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014?

3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul di dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014.
2. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014.
3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2014.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## **3. Bagi Pemerintah**

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam membuat kebijakan atau langkah strategis dalam upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah melalui Pajak Daerah.

## **4. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan**

Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I adalah Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Pembahasan dan Analisis, dan Bab V Penutup yang terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka dimana bab ini berisi landasan teori, berbagai penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dari penelitian serta hipotesis penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian dimana pada bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan dimana pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.